

**ANALISIS FAKTOR PEMICU RADIKALISME PADA REMAJA  
SERTA DAMPAKNYA PADA DEMOKRASI**

Inna Umi Fadillah <sup>1</sup>, Julia Agnesia Harianja <sup>2</sup>, Wan Saskia Putri <sup>3</sup>, Anugrah Setiawan <sup>4</sup>  
Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Negeri Medan<sup>1234</sup>  
Corresponding Author: [innaumifadillah@gmail.com](mailto:innaumifadillah@gmail.com) <sup>1</sup>, [juliaagnes431@gmail.com](mailto:juliaagnes431@gmail.com) <sup>2</sup>,  
[wansaskiaputri31@gmail.com](mailto:wansaskiaputri31@gmail.com) <sup>3</sup>, [anugrah91@unimed.ac.id](mailto:anugrah91@unimed.ac.id) <sup>4</sup>

**Info Artikel**

**Submitted:** 09 Oktober 2025

**Revised :** 11 Oktober 2025

**Accepted:** 21 Oktober 2025

**Published:** 22 Oktober 2025

**Keywords:** Youth Radicalism,  
Democracy, Intolerance, Digital  
Media

**Kata Kunci:** Radikalisme  
Remaja, Demokrasi, Intoleransi,  
Media Digital

**Abstract**

*This study analyzes the driving factors of youth radicalism and its impact on democracy in Indonesia. Using a qualitative approach with a literature review method, the research examines sources from journals and books. The findings reveal that youth radicalism is triggered by several main factors: ideological, psychological (identity crisis), socio-cultural (discrimination, cultural exclusivism), economic (injustice and inequality), and the influence of digital media. This phenomenon poses serious threats to democracy, including the erosion of tolerance, threats to religious freedom, increased social polarization, the weakening of healthy political participation, and declining public trust in democratic institutions. The study emphasizes that youth radicalism is not merely an individual problem but a collective challenge that endangers the sustainability of democracy. Therefore, preventive measures must be carried out synergistically through the roles of families, education, government, media, and society in strengthening the resilience of young generations.*

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis faktor-faktor pemicu radikalisme pada remaja serta dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kajian literatur, penelitian ini menelaah sumber dari jurnal dan buku. Hasil kajian menunjukkan bahwa radikalisme remaja dipicu oleh beberapa faktor utama, yaitu ideologis, psikologis (krisis identitas), sosial-budaya (diskriminasi, eksklusivitas budaya), ekonomi (ketidakadilan dan kesenjangan), serta pengaruh media digital. Fenomena ini berdampak serius pada demokrasi, antara lain terkikisnya nilai toleransi, ancaman terhadap kebebasan beragama, meningkatnya polarisasi sosial, melemahnya partisipasi politik sehat, hingga berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Penelitian ini menegaskan bahwa radikalisme remaja bukanlah masalah individu semata, melainkan persoalan kolektif yang mengancam keberlanjutan demokrasi. Oleh karena itu, pencegahan perlu dilakukan secara sinergis melalui peran keluarga, pendidikan, pemerintah, media, dan masyarakat dalam memperkuat ketahanan generasi muda.



*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).*

**Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara**

**PENDAHULUAN**

Demokrasi merupakan suatu paradigma pemerintahan yang menitikberatkan pada prinsip kedaulatan rakyat, di mana dalam sistem pemerintahan yang bersifat demokratis, rakyat diposisikan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam proses penyelenggaraan negara (Sinaga, 2025). Sementara itu, menurut Megawati (2024), demokrasi dapat dipahami sebagai suatu

sistem pengelolaan pemerintahan yang berlandaskan pada pengakuan terhadap harkat, martabat, serta hak asasi manusia dalam seluruh dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, implementasi demokrasi pada tataran praktik masih menghadapi tantangan serius berupa fenomena radikalisme di kalangan generasi muda. Radikalisme sendiri dimaknai sebagai suatu proses internalisasi ideologi ekstrem yang mendorong seseorang untuk mengadopsi pandangan radikal, termasuk kesiapan untuk menggunakan, mendukung, ataupun memfasilitasi tindak kekerasan sebagai sarana dalam memengaruhi perubahan sosial (Rasyid dkk., 2022).

Fase remaja, yang mencakup rentang usia antara 15 hingga 18 tahun, merupakan masa transisi dari periode kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada tahap ini, individu cenderung aktif dalam berbagai aktivitas pencarian jati diri (ego identity). Masa remaja ditandai dengan perkembangan hubungan sosial yang lebih matang dengan kelompok sebaya, peningkatan kemampuan intelektual serta pemahaman terhadap nilai-nilai kewarganegaraan, pembentukan perilaku sosial yang bertanggung jawab, internalisasi nilai moral dan etika sebagai pedoman hidup, serta penguatan dimensi spiritual dan pengalaman keagamaan. Dalam konteks perkembangan keyakinan, remaja umumnya berada pada tahap kepercayaan sintetik-konvensional, yaitu fase di mana individu menunjukkan kepatuhan terhadap pandangan dan sistem kepercayaan lingkungan sekitarnya tanpa disertai sikap kritis dalam memahami keyakinan tersebut. Kondisi ini dapat menjadi pintu masuk bagi doktrinasi paham radikalisme. Ketika seorang remaja telah terpapar ideologi radikal, pola pikirnya cenderung ekstrem, bahkan dapat memaknai jihad melalui tindakan destruktif seperti bom bunuh diri, mengabaikan nilai kekeluargaan, serta gagal berperan sebagai individu yang konstruktif dalam masyarakat (Sanjaya & Putranto, 2022).

Secara etimologis, istilah radikalisme berakar dari kata Latin radix yang berarti “akar”, yang menggambarkan suatu kecenderungan untuk melakukan perubahan dari dasar atau akar permasalahan. Dalam pengertian konseptual, radikalisme menunjuk pada suatu ideologi atau aliran pemikiran yang menghendaki terjadinya transformasi sosial maupun politik secara mendasar melalui pendekatan yang bersifat ekstrem, bahkan kerap disertai tindakan kekerasan. Namun demikian, radikalisme juga dapat dimaknai sebagai orientasi psikologis dan ideologis yang mendorong seseorang atau kelompok untuk memperjuangkan pembaharuan secara menyeluruh dalam sistem yang ada.

Secara sosiologis, kemunculan paham radikal umumnya dikaitkan dengan kondisi sosial yang tidak seimbang, di mana kelompok minoritas merasa terpinggirkan atau mengalami ketidakadilan dalam aspek politik, sosial, maupun keagamaan. Fenomena ini sering kali dipahami sebagai bentuk reaksi terhadap tersumbatnya saluran kebebasan berekspresi serta kegagalan struktur sosial dalam memberikan ruang keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Azca dalam Lubis & Husna (2020), radikalisme merupakan gejala sosial-politik yang lahir akibat disorganisasi dan ketimpangan dalam tatanan masyarakat.

Dalam konteks keindonesiaan, radikalisme menjadi salah satu problem sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius, sebab dampaknya tidak hanya bersifat lokal tetapi juga global. Isu radikalisme telah berkembang menjadi persoalan lintas negara karena implikasinya yang destruktif terhadap tatanan nilai, moral, serta kohesi sosial di masyarakat (Lewoleba, 2023). Penganut paham radikal pada umumnya berusaha memperoleh legitimasi publik melalui tindakan-tindakan ekstrem yang menarik perhatian massa (Marsudi dkk., 2019).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan dengan tema “analisis

faktor pemicu radikalisme pada remaja serta dampaknya pada demokrasi”. Kajian literatur dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, serta menganalisis hasil penelitian sebelumnya yang membahas faktor-faktor pemicu radikalisme pada remaja, baik dari aspek sosial, budaya, pendidikan, maupun teknologi. Selain itu, literatur yang berkaitan dengan dampak radikalisme terhadap stabilitas dan kualitas demokrasi juga ditinjau secara kritis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fenomena krisis identitas yang lazim dialami oleh kelompok muda pada masa transisi perkembangan psikologis menjadikan mereka sangat rentan terhadap penetrasi ideologi radikal berbasis agama. Pada fase ini, terjadi apa yang disebut sebagai *cognitive opening* atau keterbukaan kognitif, yakni suatu mekanisme mikro-sosiologis yang membuka ruang penerimaan terhadap ide-ide baru yang ekstrem dan berbeda dari arus utama. Gejala tersebut diperkuat oleh berbagai temuan statistik yang mengindikasikan bahwa mayoritas pelaku aksi terorisme, pengeboman bunuh diri, serta partisipan dalam konflik bersenjata di Suriah berasal dari kalangan muda. Kerentanan psikologis tersebut secara strategis dimanfaatkan oleh jaringan teror yang memanfaatkan energi emosional dan instabilitas psikologis generasi muda terutama mereka yang cenderung impulsif, mudah frustrasi, merasa teralienasi, serta memiliki ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi sosial dan politik di sekitarnya.

Kelompok radikal kemudian menawarkan justifikasi teologis, narasi perubahan sosial, serta identitas kolektif yang seolah mampu memberikan arah, makna, dan tujuan hidup baru. Mereka juga menciptakan ekosistem yang mendukung kebutuhan psikologis remaja akan pengakuan dan keberanian, melalui penyediaan lingkungan, fasilitas, serta perlengkapan yang memungkinkan mereka menyalurkan hasrat heroik dalam bentuk tindakan kekerasan (Widyaningsih dkk., 2017).

Dalam konteks kontemporer, sikap radikal bahkan telah bergeser menjadi semacam *trend identity* di kalangan muda. Keberanian untuk berpikir ekstrem hingga terlibat langsung dalam aktivitas kekerasan seperti mengangkat senjata, berperang, atau melakukan aksi bom bunuh diri sering dipersepsikan sebagai manifestasi dari jiwa petarung dan keberanian moral. Narasi heroisme semu ini dimanfaatkan secara efektif oleh kelompok teroris sebagai strategi rekrutmen, terutama melalui media sosial yang memberikan akses luas, cepat, dan tanpa batas ruang maupun waktu. Di sisi lain, individu muda yang mengalami kekosongan emosional, kurang perhatian keluarga, serta minim dukungan sosial menjadi target empuk penyebaran ideologi radikal.

Radikalisme di Indonesia, khususnya di kalangan remaja, bukanlah fenomena spontan, melainkan hasil dari interaksi kompleks berbagai faktor sosial, ekonomi, politik, dan psikologis. Kondisi ini menjadi paradoksal karena generasi muda yang seharusnya menjadi tumpuan pembangunan bangsa justru terjebak dalam arus ideologis yang destruktif terhadap masa depan mereka sendiri. Beberapa faktor yang berperan dalam memicu radikalisme generasi muda antara lain:

1. Keterbatasan kebebasan dan ketimpangan sistemik. Radikalisme sering muncul sebagai respon terhadap struktur sosial dan politik yang dianggap represif dan menindas. Dalam konteks ini, radikalisme bukan sekadar bentuk perlawanan, tetapi juga ekspresi kesadaran kritis terhadap ketidakadilan struktural. Dengan demikian, menjadi radikal mencerminkan kehendak untuk mentransformasi sistem yang mengekang kebebasan manusia, bukan sekadar bentuk penyimpangan ideologis.
2. Disparitas sosial dan kecemasan masa depan. Ketimpangan ekonomi dan sosial yang tajam menciptakan rasa ketidakpastian dan kekhawatiran kolektif terhadap arah kehidupan, yang berujung pada hilangnya harapan terhadap masa depan.

3. Munculnya fatalisme sosial. Rasa tidak berdaya yang timbul dari kondisi sosial yang timpang menyebabkan individu melihat diri mereka sebagai produk dari sistem yang tak dapat diubah. Dalam situasi ekstrem, fatalisme ini berkembang menjadi bentuk perlawanan terhadap norma sosial yang berlaku. Ketika keputusan telah melewati ambang batas toleransi, sebagian kelompok memilih jalur pelanggaran sebagai ekspresi ketidakpuasan dan upaya memaknai kembali eksistensi diri melalui tindakan radikal.

4. Dalam kerangka analisis sosiologis, keterlibatan individu maupun kolektif dalam gerakan-gerakan radikal dapat dijelaskan melalui dua faktor mendasar. Pertama, munculnya krisis identitas yang secara signifikan memengaruhi dinamika psikososial generasi muda. Fenomena ini memicu terjadinya keterbukaan kognitif, yaitu keadaan mental yang membuat individu lebih reseptif terhadap ideologi baru yang bersifat ekstrem serta mendorong mereka untuk melakukan “tindakan identitas” sebagai upaya rekonstruksi jati diri. Kondisi tersebut sering kali melahirkan sensasi eksistensial yang memperkuat perasaan bermakna dalam diri seseorang. Di sisi lain, proses ini kerap diperkuat oleh apa yang disebut sebagai “guncangan moral” (*moral shock*), yaitu respons emosional yang timbul akibat kejadian atau informasi tak terduga yang menimbulkan kemarahan dan kekecewaan mendalam. Reaksi moral tersebut kemudian berkembang menjadi rasa solidaritas sosial yang berpotensi mengarahkan individu pada keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas radikal.

5. Dalam fase perkembangan menuju kedewasaan, kaum muda berada pada masa transisi psikologis dan sosial yang membuat mereka lebih impulsif dan reaktif terhadap perubahan sosial di sekitarnya. Keadaan ini meningkatkan probabilitas mereka untuk ikut serta dalam gerakan sosial bernuansa radikal dibandingkan kelompok usia dewasa. Rentannya generasi muda terhadap krisis identitas memperbesar peluang terbentuknya keterbukaan kognitif, yang pada akhirnya membuat mereka lebih mudah menerima ideologi baru yang berorientasi ekstrem. Selain itu, keterlibatan mereka dalam arus radikalisme juga sering kali dipicu oleh pengalaman emosional yang bersifat “kejutan moral,” yang berperan sebagai pemicu munculnya tindakan sosial kolektif.

6. Disparitas ekonomi yang menciptakan kecemburuan sosial (*social grievance*) turut berperan sebagai pemantik munculnya gerakan radikal. Ketimpangan distribusi sumber daya dan kesenjangan sosial-ekonomi mendorong individu maupun kelompok untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui bentuk-bentuk perlawanan atau protes sosial terhadap struktur sosial yang dianggap tidak adil. Dengan demikian, faktor ekonomi berfungsi sebagai dorongan instrumental yang memperkuat motivasi ideologis di balik munculnya radikalisme.

7. Dimensi religiusitas juga menjadi determinan penting dalam memahami akar kemunculan gerakan radikal. Dapat diidentifikasi bahwa faktor yang berperan bukanlah agama sebagai sistem normatif, melainkan perasaan religius atau sentimen keagamaan yang melahirkan solidaritas spiritual terhadap pihak-pihak yang dianggap tertindas oleh kekuatan tertentu.

Radikalisme sering kali mengklaim legitimasi religius dengan mengusung simbol-simbol keagamaan, narasi jihad, dan konsep syahid sebagai justifikasi moral atas tindakannya. Namun, dalam tataran epistemologis, sentimen keagamaan tersebut lebih tepat dipahami sebagai hasil konstruksi interpretatif terhadap realitas keagamaan yang bersifat subjektif dan relatif (Lewoleba, 2023).

Menurut Nafsiyah dan Khusnul (2024), fenomena radikalisme di kalangan remaja merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai determinan yang saling berkelindan, meliputi dimensi ekonomi, sosial, budaya, serta ideologis. Setiap faktor tersebut memiliki kontribusi spesifik yang membentuk pola berpikir dan perilaku remaja terhadap kecenderungan ideologi ekstrem.

Pertama, aspek ekonomi menjadi salah satu pemicu utama munculnya radikalisme. Ketimpangan ekonomi dan kemiskinan yang berkepanjangan sering kali menciptakan rasa frustrasi dan keterasingan di kalangan remaja dari kelompok berdaya ekonomi rendah. Ketika peluang ekonomi terbatas dan keadilan distribusi sumber daya tidak terpenuhi, muncul perasaan tidak berdaya terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Dalam kondisi demikian, ideologi ekstrem sering kali dipersepsikan sebagai jalan alternatif untuk memperoleh keadilan dan pengakuan sosial, sehingga remaja dari kelompok terpinggirkan lebih rentan terhadap infiltrasi paham radikal.

Kedua, faktor sosial turut memainkan peranan signifikan. Lingkungan sosial yang tidak inklusif, disertai diskriminasi, penolakan, atau kegagalan dalam proses integrasi sosial, dapat memicu pencarian identitas baru di luar norma sosial yang berlaku. Masa remaja, yang secara psikologis merupakan periode pencarian jati diri, menjadikan individu sangat peka terhadap rasa keterasingan dan kurangnya penerimaan. Dalam situasi di mana mereka merasa tidak dihargai atau kehilangan arah hidup, kelompok radikal kerap menjadi ruang substitusi untuk mendapatkan makna, tujuan, serta rasa memiliki.

Ketiga, dimensi budaya juga berpotensi menumbuhkan benih radikalisme, khususnya dalam konteks budaya yang bersifat eksklusif dan menganggap nilai-nilai kelompok tertentu lebih unggul dibandingkan budaya lain. Perubahan budaya yang cepat, benturan nilai akibat globalisasi, serta pengaruh budaya asing dapat menimbulkan disorientasi identitas di kalangan remaja. Ketika hal tersebut terjadi, radikalisme dapat muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap modernitas yang dianggap mengancam nilai tradisional. Selain itu, media massa dan budaya populer turut memperkuat proses tersebut melalui penyebaran konten yang mengagungkan kekerasan dan ekstremisme. Pemahaman keagamaan yang sempit, tekstual, dan tidak seimbang dalam pendidikan agama juga dapat memperkuat pola pikir radikal di kalangan generasi muda.

Keempat, faktor ideologis menjadi aspek yang memperkuat kecenderungan radikal. Ideologi ekstrem, baik yang berlandaskan politik maupun agama, kerap menawarkan jawaban instan terhadap permasalahan eksistensial remaja. Melalui media sosial dan platform digital, ideologi tersebut disebarluaskan dengan narasi yang menggugah emosi dan menjanjikan perubahan cepat terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan. Remaja dengan tingkat literasi kritis rendah dan pemikiran yang masih labil lebih mudah terpengaruh oleh wacana semacam itu, sehingga berpotensi terlibat dalam aktivitas yang bersifat radikal.

Dalam era modern ini, fenomena radikalisme menjadi salah satu tantangan serius bagi keberlangsungan sistem demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Radikalisme tidak hanya memengaruhi aspek sosial, budaya, dan keagamaan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tatanan politik dan nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun. Ideologi radikal sering kali muncul sebagai bentuk penolakan terhadap keberagaman dan perbedaan pandangan yang seharusnya menjadi ciri utama sistem demokrasi. Ketika ideologi tersebut berkembang tanpa pengawasan dan pendidikan politik yang baik, maka dapat mengancam stabilitas sosial serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis.

Radikalisme berpotensi memberikan implikasi yang mendalam terhadap keberlangsungan sistem demokrasi dalam suatu tatanan sosial. Pengaruh tersebut muncul melalui penetrasi ideologi ekstrem yang mampu mengguncang fondasi nilai-nilai serta mekanisme demokratis yang telah terbangun. Secara lebih rinci, bentuk-bentuk dampak radikalisme terhadap demokrasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ancaman terhadap Kebebasan Ekspresi: Paham radikal pada umumnya memperlihatkan intoleransi terhadap pandangan yang bertentangan, sehingga menimbulkan atmosfer sosial yang represif dan mengekang kebebasan berekspresi. Kondisi ini menghambat dinamika dialog

terbuka serta pertukaran pemikiran kritis yang merupakan elemen esensial dalam praktik demokrasi.

2. Disrupsi Stabilitas Politik: Keberadaan kelompok berhaluan ekstrem yang menggunakan kekerasan sebagai sarana perjuangan politik berpotensi menimbulkan disintegrasi dan mengganggu proses demokratisasi, yang pada akhirnya menciptakan instabilitas politik dan sosial secara luas.

3. Reduksi Partisipasi Publik: Dalam konteks tertentu, ideologi radikal dapat menimbulkan apatisisme politik di kalangan masyarakat atau bahkan mendorong tindakan koersif untuk memanipulasi hasil politik, sehingga menghambat terciptanya partisipasi yang bebas, setara, dan berkeadilan dalam sistem demokrasi.

4. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia: Kelompok ekstremis kerap melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti penggunaan kekerasan, tindakan diskriminatif terhadap minoritas, serta penindasan terhadap kebebasan individu demi mencapai tujuan ideologis mereka.

5. Erosi terhadap Keragaman Sosial: Ideologi radikal cenderung menolak pluralitas pandangan dan nilai, yang pada akhirnya mengancam eksistensi kelompok minoritas serta menurunkan tingkat inklusivitas dalam struktur masyarakat demokratis.

6. Degradasi Institusi Demokrasi: Serangan yang diarahkan terhadap lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen, media independen, atau organisasi sipil, dapat mengikis kredibilitas dan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis.

7. Destabilisasi Keamanan Nasional: Aktivitas radikal yang berorientasi pada kekerasan menciptakan ketidakpastian dan rasa tidak aman di tengah masyarakat, sehingga mengganggu stabilitas sosial serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap negara dan sistem politiknya (Arham, 2023).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa radikalisme pada remaja dipicu oleh berbagai faktor yang saling terkait, di antaranya krisis identitas, diskriminasi sosial, kesenjangan ekonomi, eksklusivitas budaya, ideologi ekstrem, serta pengaruh media digital. Masa remaja sebagai fase pencarian jati diri membuat mereka rentan terhadap doktrinasi dan propaganda, terutama ketika kurang mendapatkan perhatian dari keluarga maupun lingkungan. Kelompok radikal memanfaatkan kondisi ini dengan menyebarkan narasi ekstrem melalui media sosial, menawarkan identitas, solidaritas, dan legitimasi ideologi kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa radikalisme remaja bukanlah gejala yang muncul tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi kondisi sosial, psikologis, dan struktural yang tidak teratasi dengan baik.

Dampak radikalisme remaja terhadap demokrasi sangat serius. Ideologi radikal berpotensi mengikis nilai toleransi, membatasi kebebasan berpendapat dan beragama, serta memperdalam polarisasi sosial di masyarakat. Selain itu, radikalisme juga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi demokratis dan menghambat regenerasi kepemimpinan yang sehat di masa depan. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh melalui peran keluarga, sekolah, pemerintah, media, dan masyarakat untuk memperkuat ketahanan ideologi, meningkatkan literasi digital, serta menanamkan nilai kebangsaan. Kolaborasi multipihak menjadi kunci untuk membentengi generasi muda dari pengaruh radikal dan menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arham, R. (2023). Eksplorasi dinamika Islam, radikalisme, dan demokrasi dalam masyarakat kontemporer. *Journal of Islamic Education Studies (JIES)*. 2(1), 56-65. Pascasarjana Universitas Islam Jakarta.

- Lewoleba, K. K. (2023). Kajian faktor penyebab dan upaya pencegahan radikalisme di kalangan remaja. *Jurnal Ilmiah Hospitality*. 12(1): 171-177.
- Lubis, D & Husna, S., S. (2020). Bahaya Radikalisme terhadap Moralitas Remaja melalui Teknologi Informasi (Media Sosial). *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. 20(1):21-34.
- Marsudi, I, Ahmad, B, Subuh, I.,H, Bayu, A,Mukhzamilah, Kunjung, A, Mohammad, S, Oce,W.(2019).*Menangkal Radikalisme di Kampus*.Surabaya:Pusat Pembinaan Ideologi Universitas Negeri Surabaya.
- Megawati. (2024). *DEMOKRASI PERMUSYAWARATAN PANCASILA*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Nafsiyah, F, Khusnul, W.(2024). PERAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MENCEGAH RADIKALISME DI KALANGAN REMAJA. *Al-Rabwah : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 18(2): 93-104.
- Rasyid, A, Rayendriani, F., L, Muhammad, W., R. H, Maulana, A., L.(2022). *ETNIS NUSANTARA DALAM MENANGKAL RADIKALISME D INDONESIA*. Bantul: Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Sanjaya, A & Rahmat, D., P. (2022). Upaya Pencegahan Radikalisme Melalui Media Sosial Di Kalangan Remaja. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*. 2(1): 63-69.
- Sinaga, O., dkk. (2024). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Medan: CV Harapan Cerdas.
- Widyaningsih, R, Sumiyem, Kuntarto. (2017). KERENTANAN RADIKALISME AGAMA DI KALANGAN ANAK MUDA. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*. 1553-1562.